

REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR,  
PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT  
KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2016**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat.**
- PERTAMA : Menunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai berikut.

1. Tugas Narasumber LKPP :
  - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - b. Menyampaikan materi mengenai Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - c. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
2. Tugas Narasumber Provinsi :
  - a. Memaparkan tentang hasil *self assessment* tingkat Kematangan Organisasi ULP Provinsi Sulawesi Barat.
  - b. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat.
3. Tugas Moderator :
  - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat agar berjalan sesuai dengan topiknya;
  - b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Tugas Panitia LKPP :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Panitia Lokal;
  - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat.
5. Tugas Anggota Panitia Lokal :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

- KEEMPAT : Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Barat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Januari 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia**



**Dharma Nursani**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2016  
TANGGAL : 26 JANUARI 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	Arianto	Pemprov Sulawesi Barat	Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Narasumber Provinsi
2	Irwan Romo	Pemprov Sulawesi Barat	Kepala Seksi Perencanaan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Moderator
3	M. Yamin Saleh	Pemprov Sulawesi Barat	Kepala Seksi Hukum dan Sanggah Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Ketua Panitia Lokal
4	Dwi Novalita Tanri Abeng	Pemprov Sulawesi Barat	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretaris Panitia Lokal
5	Ichwan Makmur Nasution	LKPP	Kepala Subdirektorat Program Pelatihan	Narasumber LKPP
6	Muhammad Firdaus	LKPP	Kepala Seksi Standar Kompetensi	Narasumber LKPP
7	Ermawanto	LKPP	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Panitia LKPP

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2016  
TANGGAL : 26 JANUARI 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Narasumber Provinsi	III	Rp. 900.000	1 OJ	Rp. 900.000
2	Moderator	IV	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
3	Ketua Panitia Lokal	IV	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	IV	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Narasumber LKPP	III	Rp. 900.000	2 OJ	Rp. 1.800.000
6	Narasumber LKPP	IV	Rp. 800.000	2 OJ	Rp. 1.600.000
7	Panitia LKPP	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani